

# **DEFINISI DAN PEMETAAN RISIKO**

## **POLITEKNIK NEGERI BATAM**



# DEFINISI RISIKO

KATEGORI RISIKO	DEFINISI
<b>Risiko Strategis/Kebijakan</b>	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan atau kegagalan dalam penyusunan dan penetapan, implementasi, ataupun evaluasi kebijakan strategis organisasi, termasuk dalam mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal organisasi baik terkait kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun teknologi.
<b>Risiko Reputasi</b>	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau kepercayaan pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ) dan publik terhadap organisasi.
<b>Risiko Kecurangan (Fraud)</b>	Risiko yang berkaitan dengan tindakan kecurangan yang mengandung unsur kesengajaan dan merugikan keuangan negara, meliputi antara lain: penggelapan aset (kas atau barang milik negara), penipuan, penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, ataupun jasa.
<b>Risiko Keuangan</b>	Risiko yang berkaitan dengan kondisi keuangan organisasi, meliputi penganggaran, belanja (antara lain penyerapan belanja organisasi, ketidaksesuaian sasaran belanja), pendapatan (tidak terpenuhinya target pendapatan), aset organisasi termasuk barang milik negara, serta kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya kepada organisasi.
<b>Risiko Hukum</b>	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan atau gugatan hukum, maupun upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan dalam organisasi.
<b>Risiko Kepatuhan</b>	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pihak internal ataupun eksternal organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

JENIS RISIKO	DEFINISI
<b>Risiko Integritas</b>	Potensi kerugian atau dampak negatif yang timbul akibat perilaku, tindakan, atau keputusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, kejujuran, dan standar profesional yang telah ditetapkan oleh organisasi.
<b>Risiko Operasional</b>	Risiko yang berkaitan dengan: a. ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses bisnis organisasi (yang disebabkan antara lain oleh kendala sumber daya manusia, pendanaan, atau peralatan), sistem informasi dan komunikasi, atau keselamatan kerja pegawai. b. peristiwa di luar organisasi (eksternal) yang mempengaruhi operasional organisasi.
<b>Risiko Kebijakan dan Prosedur</b>	Risiko kebijakan dan prosedur dalam konteks perguruan tinggi adalah risiko yang timbul akibat tidak adanya, tidak lengkapnya, atau tidak diterapkannya kebijakan dan prosedur secara konsisten, yang dapat mengakibatkan ketidaktercapaian tujuan institusi, ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, atau menurunnya kualitas layanan publik dan akademik.
<b>Risiko IT</b>	Risiko Teknologi Informasi dalam konteks perguruan tinggi adalah risiko yang terkait dengan penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan sistem informasi, data digital, dan infrastruktur teknologi, yang dapat mengganggu kelangsungan layanan administratif, akademik, atau pelayanan publik.

# PEMETAAN RISIKO

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
1	Risiko Strategis/ Kebijakan	Risiko Integritas	Penyusunan kebijakan tidak berbasis data atau <i>evidence-based</i>	Kebijakan strategis disusun tanpa kajian, data akurat, atau konsultasi publik.	Kebijakan tidak efektif, penolakan publik, kerugian anggaran.	Manajemen, Penjaminan Mutu, Perencanaan
			Konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan	Keputusan strategis dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu.	Ketimpangan layanan, hilangnya kepercayaan stakeholder.	Manajemen, Dewan/Komite, Auditor, SPI
			Ketidakkonsistenan antara kebijakan dan implementasi	Kebijakan yang ditetapkan tidak dijalankan atau dijalankan tidak sesuai.	Gagalnya pencapaian tujuan strategis, reputasi buruk lembaga.	Manajemen, Unit Pelaksana
			Kurangnya transparansi dalam penyusunan atau revisi kebijakan	Proses pengambilan kebijakan tertutup dan tidak melibatkan pemangku kepentingan.	Protes dari internal/eksternal, dugaan kolusi atau manipulasi kebijakan.	Manajemen, Humas
			Penyusunan kebijakan tidak mengacu pada regulasi lebih tinggi	Kebijakan lembaga bertentangan dengan peraturan nasional atau kementerian.	Kebijakan dibatalkan, sanksi hukum atau administratif.	Manajemen, Bagian Umum (Biro Hukum), Penjaminan Mutu
		Risiko Operasional	Kegagalan implementasi kebijakan strategis	Kebijakan telah dibuat, namun pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan.	Tujuan strategis tidak tercapai, pemborosan anggaran, hilangnya kredibilitas.	Manajemen, Unit Pelaksana
			SDM tidak siap menjalankan kebijakan baru	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi terkait kebijakan yang baru diterapkan.	Kebijakan tidak diadopsi dengan baik, resistensi internal.	Manajemen, OSDM, Unit Kerja
			Kurangnya koordinasi antar unit dalam pelaksanaan kebijakan	Unit kerja bekerja secara silo tanpa sinergi dalam menerapkan kebijakan.	Implementasi terhambat, hasil tidak konsisten antar unit.	Manajemen, Unit Kerja

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
			Prosedur operasional tidak mendukung kebijakan strategis	SOP yang ada belum diperbarui untuk mendukung kebijakan baru.	Ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan lapangan.	Manajemen, Penjaminan Mutu, Unit Kerja
			Keterlambatan pelaksanaan kebijakan karena hambatan administratif	Lambatnya persetujuan, dokumen, atau proses birokrasi dalam implementasi.	Target strategis meleset, laporan tidak tepat waktu, citra lembaga menurun.	Penjaminan Mutu, Unit Pelaksana, Bagian Umum (Administrasi)
		Risiko Prosedur	Ketidaksesuaian SOP dengan kebijakan strategis baru	SOP belum diperbarui untuk menyesuaikan arah kebijakan baru lembaga.	Pelaksanaan kebijakan tidak optimal, muncul kesenjangan antar unit.	Penjaminan Mutu, Unit Kerja
			Tidak adanya prosedur evaluasi dan monitoring kebijakan	Kebijakan dijalankan tanpa mekanisme pemantauan yang baku dan terukur.	Sulit mengukur efektivitas, keputusan strategis jadi tidak berbasis data.	Penjaminan Mutu, Unit Kerja
			Prosedur penyusunan kebijakan tidak melibatkan stakeholder	Proses penyusunan tidak inklusif atau hanya terbatas di level pimpinan.	Resistensi implementasi, minimnya dukungan dari pelaksana kebijakan.	Penjaminan Mutu, Unit Kerja, Humas
			Tidak ada prosedur dokumentasi perubahan kebijakan	Revisi atau penggantian kebijakan tidak didokumentasikan secara formal.	Kebingungan di lapangan, pelaksanaan ganda atau keliru.	Penjaminan Mutu, Unit Kerja, Humas
			Inkonsistensi antar prosedur lintas unit	Prosedur antar bagian/unit berbeda padahal berkaitan dengan kebijakan yang sama.	Kebijakan strategis tidak berjalan seragam, terjadi konflik antar unit.	Penjaminan Mutu, Unit Kerja, Humas
		Risiko Teknologi Informasi	Ketidaksesuaian kebijakan digitalisasi dengan kesiapan infrastruktur	Kebijakan digitalisasi tidak diimbangi dengan kesiapan jaringan dan perangkat.	Gagal implementasi strategi digital, kegiatan operasional terganggu.	Manajemen, Unit IT, Keuangan
			Kurangnya dukungan kebijakan terhadap pengembangan sistem IT	Tidak ada anggaran atau regulasi internal untuk pemeliharaan/pembaruan sistem.	Sistem menjadi usang, risiko keamanan meningkat, pelayanan menurun.	Perencanaan, Keuangan, Unit IT
			Kebijakan IT tidak sinkron dengan regulasi nasional	Kebijakan internal bertentangan dengan	Potensi sanksi hukum, sistem harus direvisi ulang.	Manajemen, Unit IT, Bagian Umum (Biro Hukum), SPI

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
				aturan pemerintah tentang perlindungan data.		
			Tidak adanya strategi manajemen risiko TI dalam kebijakan Lembaga	TI belum masuk dalam perencanaan strategis jangka panjang institusi.	Lembaga rentan terhadap ancaman digital (cyber risk, data breach, dll).	Manajemen, SPI, Unit IT, Perencanaan
			Kebijakan strategis tidak mempertimbangkan aspek keamanan informasi	Keamanan siber tidak menjadi prioritas dalam arah kebijakan organisasi.	Kebocoran data, ancaman ransomware, kerugian reputasi dan finansial.	Unit IT, SPI, Keuangan
2	Risiko Reputasi	Risiko Integritas	Plagiarisme oleh dosen atau mahasiswa	Karya tulis terbukti menjiplak dan diketahui publik/media.	Citra akademik lembaga rusak, reputasi dosen/mahasiswa dan institusi tercoreng.	Manajemen, Dosen, Mahasiswa, P3M
			Gratifikasi atau suap dalam proses layanan	Pegawai menerima gratifikasi dari mitra/vendor untuk mempermudah proses.	Viral di media, merusak kepercayaan publik terhadap institusi.	Manajemen, Pegawai, SPI
			Penyalahgunaan jabatan oleh pejabat kampus	Jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	Opini negatif masyarakat, potensi demo, media coverage negatif.	Manajemen, SPI, Kepegawaian
			Manipulasi data laporan akademik/keuangan	Data dimanipulasi agar terlihat sesuai target, dan kemudian terbongkar.	Menurunkan integritas organisasi di mata mitra, publik, dan regulator.	Manajemen, Unit Kerja, SPI, Auditor
			Konflik kepentingan yang tidak diungkapkan	Pejabat terlibat dalam keputusan strategis yang menguntungkan dirinya/keluarga.	Hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan, reputasi institusi menurun.	Manajemen, Unit Kerja, Bagian Umum (Biro Hukum), SPI
		Risiko Operasional	Gagal menyelenggarakan kegiatan public	Kegiatan besar seperti seminar nasional, wisuda, atau pelatihan gagal dilaksanakan sesuai rencana.	Reputasi institusi menurun, kekecewaan dari peserta, mitra, dan publik.	Manajemen, Panitia, Humas
			Pelayanan lambat dan tidak professional	Layanan akademik atau administrasi publik tidak	Keluhan masyarakat, viral di media sosial, persepsi negatif terhadap institusi.	Manajemen, Unit Layanan, Humas

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
				responsif atau tidak ramah.		
			Penanganan pengaduan tidak transparan	Aduan mahasiswa, pegawai, atau masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan adil.	Muncul persepsi bahwa lembaga tidak akuntabel atau anti kritik.	Manajemen, SPI, Humas
			Kesalahan dalam publikasi informasi resmi	Informasi di website, media sosial, atau surat resmi memuat kesalahan fatal.	Kebingungan publik, citra tidak profesional, dikritik secara terbuka.	Humas, Bagian Umum (Administrasi), Unit IT
			Ketidaksiapan menghadapi krisis operasional	Tidak ada SOP/strategi untuk menangani kejadian darurat (misalnya sistem down saat pendaftaran).	Kegaduhan publik, sorotan media, rusaknya kepercayaan masyarakat.	Manajemen, Unit IT, Tim Satgas K3L
		Risiko Prosedur	Tidak adanya SOP penanganan krisis reputasi	Lembaga tidak memiliki pedoman untuk menghadapi krisis publik atau media.	Respon lambat terhadap isu publik, citra lembaga menurun drastis.	Manajemen, Humas
			Prosedur pelayanan publik tidak transparan	Proses layanan administrasi tidak jelas, rumit, atau berubah-ubah.	Komplain dari masyarakat, persepsi buruk terhadap profesionalisme lembaga.	Unit Layanan, Penjaminan Mutu
			Tidak ada mekanisme evaluasi keluhan masyarakat	Pengaduan tidak ditangani sistematis dan tidak berdampak pada perbaikan layanan.	Dituding tidak akuntabel, muncul kritik terbuka di media sosial.	Humas, Unit Kerja, SPI
			Ketidaksesuaian antar SOP dan praktik di lapangan	SOP tertulis tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh petugas di lapangan.	Masyarakat bingung, kepercayaan terhadap kredibilitas lembaga menurun.	Unit Pelaksana, SPI, Penjaminan Mutu
			SOP tidak mengikuti perubahan kebijakan terbaru	SOP tidak diperbarui sesuai kebijakan pemerintah atau peraturan baru.	Pelanggaran regulasi, sorotan publik, dugaan maladministrasi.	Sekretariat, SPI, Biro Hukum
		Risiko Teknologi Informasi	Kebocoran data pribadi pengguna	Data mahasiswa, dosen, pegawai, atau masyarakat bocor akibat lemahnya keamanan sistem.	Reputasi lembaga rusak, tuntutan hukum, hilangnya kepercayaan publik.	Manajemen, Unit IT, SPI

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
			Website resmi tidak dapat diakses (sering down)	Akses ke situs resmi terganggu, terutama pada saat penting (pendaftaran, pengumuman).	Masyarakat frustrasi, muncul kritik di media sosial, reputasi digital menurun.	Manajemen, Unit IT, Humas
			Penyebaran informasi palsu melalui sistem resmi	Sistem email, web, atau media sosial diretas dan disalahgunakan untuk menyebar hoaks.	Citra profesional lembaga terganggu, kesalahpahaman publik.	Unit IT, Humas, Keamanan Informasi
			Sistem informasi akademik/error saat ujian	Error saat ujian online, input nilai, atau sistem pembelajaran digital.	Keluhan dari mahasiswa, media sosial meledak, kepercayaan terhadap sistem menurun.	IT Support, Akademik, Humas
			Ketergantungan berlebihan pada vendor eksternal	Vendor TI gagal menjaga performa dan keamanan sistem institusi.	Kinerja sistem buruk, lembaga dianggap tidak mampu mengelola TI sendiri.	Manajemen, Unit IT, Pengadaan, Vendor
3	Risiko Kecurangan ( <i>Fraud</i> )	Risiko Integritas	Pemalsuan dokumen akademik	Dosen/mahasiswa mengubah transkrip, ijazah, atau sertifikat untuk keuntungan pribadi.	Merusak kredibilitas akademik, sanksi hukum, hilangnya kepercayaan publik.	Mahasiswa, Dosen, Akademik, Senat
			Manipulasi nilai	Dosen atau pihak tertentu menaikkan nilai dengan imbalan atau hubungan tertentu.	Ketidakadilan, kualitas lulusan dipertanyakan, reputasi lembaga menurun.	Dosen, Mahasiswa, Pengelola Jurusan/Prodi
			Korupsi dana kegiatan atau proyek	Dana kegiatan (penelitian, pelatihan, pengabdian) diselewengkan untuk kepentingan pribadi.	Kerugian keuangan, temuan audit, ancaman hukum.	Keuangan, SPI, Penerima Dana, P3M, Auditor
			Gratifikasi atau suap dalam promosi jabatan	Pegawai memberi atau menerima imbalan untuk mendapat jabatan tertentu.	Proses SDM tercemar, turunnya moral pegawai lain, reputasi rusak.	Manajemen, Pegawai, OSDM, SPI
			Konflik kepentingan yang disembunyikan	Pengambil keputusan tidak mengungkapkan relasi pribadi/bisnis dalam suatu proyek.	Penyalahgunaan wewenang, proyek tidak objektif, pelanggaran etika.	Manajemen, SPI, Unit Pengadaan

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Pelaporan fiktif kegiatan	Kegiatan dilaporkan telah dilaksanakan padahal tidak dilakukan secara nyata.	Kerugian anggaran, potensi pidana, mencoreng kredibilitas institusi.	Penanggung Jawab Kegiatan, SPI, Auditor, Keuangan
			Pengadaan barang/jasa fiktif atau mark-up harga	Barang tidak benar-benar dibeli atau harga dinaikkan secara tidak wajar.	Pemborosan anggaran, potensi audit investigatif, kehilangan kepercayaan publik.	Panitia Pengadaan, Keuangan, SPI
			Penggunaan fasilitas institusi untuk kepentingan pribadi	Kendaraan dinas, alat kantor, atau ruangan digunakan untuk usaha pribadi.	Penyalahgunaan aset negara, pencemaran nama baik lembaga.	Pegawai, Bagian Umum, SPI, BMN
			Manipulasi absensi pegawai	Pegawai melakukan titip absen atau memanipulasi sistem kehadiran.	Pelanggaran disiplin, menurunnya produktivitas dan moral pegawai.	Pegawai, OSDM, Kepala Unit
			Pemalsuan tanda tangan atau dokumen operasional	Dokumen administratif dipalsukan untuk memperlancar pencairan atau proses operasional.	Dokumen tidak valid, risiko hukum, sanksi disiplin.	Pegawai, Keuangan, SPI, Kepala Unit
	Risiko Prosedur	Risiko Prosedur	Rekayasa dokumen pengadaan	Dokumen pengadaan dibuat seolah-olah sesuai prosedur padahal tidak dilaksanakan secara sah.	Pengadaan tidak sah, potensi pidana, menurunnya kepercayaan publik.	Panitia Pengadaan, SPI, Auditor
			Pembuatan laporan keuangan tidak sesuai prosedur	Penyusunan laporan keuangan dilakukan tanpa mengikuti standar akuntansi dan prosedur resmi.	Laporan tidak valid, temuan audit, reputasi lembaga tercoreng.	Keuangan, Auditor, SPI
			Pemalsuan tanda tangan dalam proses administrasi	Dokumen resmi seperti surat tugas, kwitansi, atau SPT dipalsukan untuk mencairkan dana.	Pencairan dana tidak sah, kerugian keuangan, sanksi hukum.	Pegawai, Keuangan, SPI
			Penyusunan SOP yang menguntungkan pihak tertentu	SOP disusun atau dimodifikasi untuk menguntungkan kelompok tertentu dalam pelaksanaan kegiatan.	Penyalahgunaan wewenang, ketimpangan dalam pelaksanaan program.	Pimpinan, SPI, Bagian Umum (Biro Hukum)



NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
		Risiko Teknologi Informasi	Penerapan prosedur yang tidak adil dalam seleksi atau promosi	Proses seleksi jabatan atau promosi tidak transparan dan tidak sesuai prosedur tertulis.	Ketidakadilan, moral pegawai turun, potensi protes internal.	Manajemen, OSDM, SPI
			Pemalsuan data melalui system	Pegawai atau pengguna mengubah data akademik, keuangan, atau kepegawaian secara ilegal melalui sistem TI.	Integritas data rusak, kerugian keuangan, potensi tindakan hukum.	Unit IT, Auditor, SPI, Unit Kerja, Bagian Umum (Biro Hukum)
			Penggunaan akun palsu atau pencurian kredensial	Akses sistem dilakukan oleh pihak tidak berwenang dengan menggunakan akun orang lain.	Penyalahgunaan sistem untuk transaksi fiktif atau sabotase.	Unit IT, Pengguna Sistem, OSDM
			Manipulasi sistem pembayaran digital	Sistem pembayaran (UKT, belanja) dimodifikasi untuk mengalihkan dana.	Kerugian finansial langsung, temuan audit, potensi pidana.	Unit IT, Keuangan, Auditor, SPI
			Pembuatan database atau sistem bayangan (shadow system)	Sistem tidak resmi digunakan untuk menyimpan dan mengatur data penting tanpa pengawasan.	Celah untuk manipulasi data, tidak dapat diaudit.	Manajemen, Unit IT, SPI, Keuangan
			Penghapusan atau perubahan log aktivitas sistem	Pelaku menghapus jejak penggunaan sistem untuk menyembunyikan kecurangan.	Bukti hilang, menyulitkan investigasi forensik digital.	Unit IT, Auditor, Tim Investigasi, SPI
4	Risiko Keuangan	Risiko Integritas	Penyelewengan anggaran	Penggunaan dana tidak sesuai perencanaan atau untuk kepentingan pribadi.	Kerugian negara/lembaga, sanksi hukum dan administratif.	Keuangan, PPK, Auditor, SPI
			Laporan keuangan fiktif	Data laporan keuangan direkayasa untuk menutupi penggunaan dana yang tidak sah.	Kegagalan audit, turunnya kepercayaan stakeholder.	Keuangan, SPI, Auditor
			Kelebihan pembayaran honorarium atau tunjangan	Pembayaran melebihi standar atau kepada orang yang tidak berhak.	Pemborosan anggaran, potensi temuan BPK, sanksi pengembalian.	Pengelola Program, OSDM, Keuangan, SPI

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
			Pemotongan dana tidak sesuai peraturan	Pemotongan dana kegiatan, gaji, atau bantuan tanpa dasar hukum.	Protes internal, pelanggaran hukum keuangan negara.	Manajemen, Keuangan, SPI
			Penyalahgunaan dana hibah atau bantuan luar	Dana hibah digunakan tidak sesuai perjanjian atau tanpa pertanggungjawaban.	Diblokirnya bantuan, tuntutan hukum dari pemberi hibah.	Peneliti/Penerima Hibah, P3M
		Risiko Operasional	Keterlambatan pencairan anggaran	Proses pencairan dana operasional terhambat karena kelalaian administratif.	Gangguan kegiatan operasional, proyek molor atau gagal dijalankan.	PPK, Keuangan, SPI
			Kesalahan input data keuangan	Kesalahan saat memasukkan data anggaran/belanja ke sistem keuangan.	Laporan keuangan tidak akurat, potensi sanksi audit.	Keuangan, Verifikator
			Kekurangan kas pada saat pelaksanaan kegiatan	Tidak ada dana yang tersedia saat kegiatan berjalan.	Kegiatan tertunda atau dibatalkan, reputasi lembaga terganggu.	Keuangan, Penanggung Jawab Kegiatan
			Tidak adanya SOP atau panduan pengelolaan keuangan	Proses pengelolaan keuangan tidak berjalan seragam dan cenderung asal-asalan.	Inkonsistensi pelaksanaan, potensi fraud atau penyimpangan.	Manajemen, SPI, Keuangan
			Pengelolaan dokumen keuangan yang tidak tertib	Dokumen keuangan tidak terdokumentasi atau disimpan dengan baik.	Sulit dipertanggungjawabkan saat audit, potensi temuan pemeriksa.	Arsiparis, Keuangan, Auditor, SPI
		Risiko Prosedur	Pelaksanaan anggaran tanpa mengikuti prosedur formal	Belanja dilakukan tanpa dokumen resmi seperti SPM/SP2D atau perintah tugas.	Tidak bisa dipertanggungjawabkan, berisiko temuan audit.	PPK, Keuangan, Auditor, SPI
			Tidak dilakukan verifikasi berjenjang atas pengeluaran keuangan	Pengeluaran langsung disetujui tanpa proses pengecekan berlapis.	Potensi kebocoran anggaran dan fraud.	Perencanaan, Kepala Unit, Keuangan, SPI
			Tidak adanya pemisahan fungsi antara perencana dan pelaksana	Perencana anggaran juga menjadi pelaksana	Konflik kepentingan, potensi manipulasi anggaran.	Kepala Unit, SPI, Keuangan

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
				kegiatan tanpa pengawasan.		
			Penunjukan penyedia barang/jasa tanpa mekanisme seleksi terbuka	Pemilihan vendor tidak melalui mekanisme pengadaan yang ditentukan.	Potensi gratifikasi, harga tidak efisien, risiko hukum.	PPK, Unit Pengadaan, SPI
			Tidak adanya dokumentasi atas perubahan rencana anggaran	Revisi anggaran dilakukan tanpa dokumen persetujuan resmi.	Kegiatan berjalan tidak sesuai rencana, risiko temuan oleh pemeriksa.	Perencanaan, Keuangan, Auditor
		Risiko Teknologi Informasi	Gangguan sistem keuangan digital	Sistem informasi keuangan (SIMAKU/SIPKD) tidak dapat diakses atau crash.	Transaksi keuangan tertunda, keterlambatan pelaporan, gangguan layanan publik.	Unit IT, Keuangan, PPK, SPI
			Akses tidak sah ke sistem keuangan	Pengguna yang tidak berwenang mengakses atau memodifikasi data keuangan.	Kebocoran data, manipulasi transaksi, kerugian keuangan.	Unit IT, Auditor, SPI
			Data keuangan tidak ter-backup dengan baik	Data penting hilang akibat tidak adanya backup berkala.	Kehilangan data, tidak bisa menyusun laporan, gagal audit.	Unit IT, Keuangan, SPI
			Integrasi sistem keuangan dengan sistem lain tidak berjalan	Sistem keuangan tidak sinkron dengan sistem kepegawaian atau pengadaan.	Inkonsistensi data, perencanaan anggaran terganggu.	Unit IT, Keuangan, Perencanaan, SPI
			Ketergantungan pada vendor pihak ketiga	Sistem dikelola sepenuhnya oleh vendor eksternal tanpa kontrol internal.	Risiko gangguan layanan, biaya tambahan, dan kebocoran data.	Unit IT, Keuangan, Pengadaan, SPI
5	Risiko Hukum	Risiko Integritas	Pelanggaran kode etik akademik	Dosen atau mahasiswa melakukan pelanggaran etika seperti plagiarisme, sabotase penelitian, atau tindakan tidak profesional.	Proses hukum internal, sanksi akademik, reputasi lembaga menurun.	Manajemen, Akademik, SPI, Senat

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
			Penyalahgunaan wewenang	Pejabat institusi menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.	Potensi tindakan hukum pidana, hilangnya kepercayaan publik.	Manajemen, Bagian Umum (Biro Hukum), Senat, OSDM
			Tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Lembaga gagal mematuhi undang-undang atau peraturan pemerintah terkait pendidikan atau administrasi.	Sanksi administratif atau hukum, denda, pembekuan izin operasional.	Manajemen, Bagian Umum (Biro Hukum), OSDM
			Penggelapan dana public	Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan institusi disalahgunakan.	Tuntutan pidana, kerugian negara, citra lembaga rusak.	Keuangan, Auditor, Bagian Umum (Biro Hukum), SPI
			Pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual	Penggunaan materi tanpa izin atau melanggar hak cipta pihak lain.	Gugatan hukum, kerugian finansial, reputasi buruk.	Humas, Bagian Umum (Biro Hukum), Akademik, P3M
		Risiko Operasional	Kegagalan mematuhi prosedur hukum dalam pengadaan	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pembatalan kontrak, sanksi hukum, kerugian finansial, rusaknya reputasi.	Panitia Pengadaan, Bagian Umum (Biro Hukum), Penjaminan Mutu
			Keterlambatan pelaporan pajak dan kewajiban legal	Lembaga terlambat atau tidak melaporkan kewajiban pajak atau laporan hukum.	Denda administrasi, masalah hukum, reputasi lembaga tercoreng.	Manajemen, SPI, Keuangan, Bagian Umum (Biro Hukum)
			Pelanggaran ketentuan penggunaan aset negara	Penggunaan aset tidak sesuai aturan, misalnya kendaraan atau gedung.	Sanksi administratif, potensi tuntutan hukum, kehilangan aset.	Manajemen, BMN (Pengelola Aset), SPI
			Tidak tersedianya dokumentasi legal yang lengkap	Dokumen kontrak, perjanjian, atau izin tidak lengkap atau hilang.	Sengketa hukum, pembatalan perjanjian, risiko hukum tinggi.	Manajemen, Bagian Umum (Biro Hukum), Bagian Umum (Administrasi)
			Ketidaksesuaian operasional dengan regulasi ketenagakerjaan	Pelanggaran hak-hak pegawai terkait jam kerja, kontrak, atau kompensasi.	Gugatan ketenagakerjaan, denda, penurunan moral pegawai.	Manajemen, Bagian Umum (Biro Hukum), OSDM
		Risiko Prosedur	Prosedur pengelolaan dokumen legal tidak terstandarisasi	Tidak adanya standar prosedur untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen hukum.	Dokumen hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, risiko hukum meningkat.	Bagian Umum (Biro Hukum), Bagian Umum (Administrasi), Penjaminan Mutu

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
			Tidak adanya prosedur review dan update regulasi	Regulasi dan SOP tidak diperbarui sesuai perubahan undang-undang atau kebijakan baru.	Pelanggaran peraturan, sanksi administratif, risiko hukum.	Manajemen, Bagian Umum (Biro Hukum), Penjaminan Mutu
			Prosedur pelaporan pelanggaran hukum yang tidak efektif	Pelaporan kasus hukum internal tidak ditangani dengan prosedur yang jelas dan cepat.	Penyelesaian kasus terlambat, kerugian reputasi dan potensi tuntutan hukum.	Manajemen, Bagian Umum (Biro Hukum), Penjaminan Mutu
			Prosedur pengadaan tanpa audit internal yang rutin	Tidak ada mekanisme audit internal yang memadai dalam proses pengadaan.	Risiko korupsi, penyalahgunaan dana, dan tuntutan hukum.	SPI, Bagian Umum (Biro Hukum), Pengadaan, Keuangan
			Ketidaksesuaian prosedur antara unit terkait hukum	Unit hukum dan unit lain tidak memiliki prosedur yang sinkron dalam menangani kasus hukum.	Terjadinya tumpang tindih tugas dan risiko kegagalan penanganan hukum.	Bagian Umum (Biro Hukum), Penjaminan Mutu, Unit Kerja
		Risiko Teknologi Informasi	Pelanggaran perlindungan data pribadi	Data pribadi mahasiswa, pegawai, atau pihak ketiga digunakan tanpa izin sesuai UU Perlindungan Data Pribadi.	Sanksi hukum, denda, gugatan, dan rusaknya reputasi lembaga.	Manajemen, Unit IT, Bagian Umum (Biro Hukum), OSDM
			Ketidakpatuhan terhadap regulasi TI nasional	Sistem TI tidak memenuhi standar atau aturan pemerintah seperti PP, Permen, atau ISO.	Sanksi administratif, penundaan operasional, pembekuan layanan TI.	Manajemen, Unit IT, Bagian Umum (Biro Hukum), OSDM
			Sistem TI digunakan untuk kegiatan ilegal	Sistem dipakai untuk aktivitas yang melanggar hukum, seperti pencucian uang atau distribusi konten ilegal.	Penyelidikan hukum, denda, pencemaran nama baik lembaga.	Manajemen, Unit IT, Bagian Umum (Biro Hukum), OSDM
			Tidak adanya audit keamanan TI secara berkala	Kurangnya audit menyebabkan celah keamanan yang tidak terdeteksi.	Pelanggaran hukum terkait keamanan data, ancaman serangan siber meningkat.	Unit IT, SPI, Auditor

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
			Penyimpanan data tanpa izin atau melanggar hak cipta	Data atau software disimpan tanpa lisensi atau melanggar hak cipta pihak lain.	Tuntutan hukum, denda, kerugian finansial, reputasi buruk.	Unit IT, Bagian Umum (Biro Hukum), Keuangan
6	Risiko Kepatuhan	Risiko Integritas	Ketidakpatuhan terhadap kode etik institusi	Pegawai atau mahasiswa melanggar kode etik yang berlaku di institusi.	Sanksi disiplin, hilangnya kepercayaan publik, reputasi lembaga menurun.	Manajemen, SPI, OSDM
			Tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait	Lembaga atau individu tidak mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan.	Sanksi hukum, denda, pembekuan izin operasional.	Manajemen, Bagian Umum (Biro Hukum), SPI
			Konflik kepentingan yang tidak diungkapkan	Pegawai menyembunyikan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.	Kerugian reputasi, potensi penyalahgunaan wewenang, sanksi etika.	Manajemen, SPI, Unit Pengadaan
			Pelaporan yang tidak akurat atau tidak lengkap	Data pelaporan ke regulator atau internal tidak sesuai fakta atau terlambat.	Risiko audit, sanksi administratif, kerugian reputasi.	Manajemen, Keuangan, SPI
			Pelanggaran aturan terkait pemberian hadiah atau gratifikasi	Pegawai menerima atau memberi hadiah/gratifikasi yang melanggar aturan.	Sanksi disiplin, hukum, rusaknya reputasi institusi.	Manajemen, SPI, Kepegawaian
		Risiko Operasional	Kegagalan mematuhi regulasi operasional	Proses operasional tidak sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.	Sanksi administratif, denda, gangguan operasional, reputasi terancam.	Manajemen, SPI, Bagian Umum, BMN
			Tidak menjalankan pelatihan kepatuhan secara rutin	Pegawai tidak mendapat pelatihan terkait kebijakan dan prosedur kepatuhan.	Pelanggaran aturan tidak terdeteksi, risiko sanksi meningkat.	Manajemen, OSDM
			Ketidakteraturan dokumentasi proses dan prosedur	Dokumentasi proses kerja dan pelaporan tidak lengkap atau tidak akurat.	Sulit membuktikan kepatuhan saat audit, risiko kesalahan dan penyelewengan.	Unit Kerja, Penjaminan Mutu, Auditor

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
			Pengelolaan izin dan lisensi yang tidak tepat waktu	Keterlambatan perpanjangan izin operasional atau lisensi penting lainnya.	Operasional terganggu, potensi sanksi hukum dan administratif.	Manajemen, Bagian Umum (Biro Hukum), Unit Kerja
			Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur standar	Pelaksanaan SOP tidak sesuai dengan standar kepatuhan yang ditetapkan.	Risiko pelanggaran aturan, potensi denda, rusaknya citra institusi.	Manajemen, Unit Kerja, Penjaminan Mutu
		Risiko Prosedur	Tidak adanya SOP kepatuhan yang jelas dan terperinci	SOP terkait kepatuhan tidak disusun atau kurang rinci sehingga sulit dipahami.	Pelanggaran aturan meningkat, ketidakteraturan dalam pelaksanaan tugas.	Manajemen, Unit Kerja, Penjaminan Mutu,
			SOP tidak diperbarui mengikuti perubahan regulasi	SOP lama masih digunakan walaupun ada perubahan aturan atau kebijakan baru.	Risiko ketidakpatuhan, sanksi administratif, potensi kerugian hukum.	Penjaminan Mutu, Unit Kerja
			Prosedur pelaporan kepatuhan yang tidak efektif	Mekanisme pelaporan tidak jelas atau tidak dijalankan dengan baik.	Keterlambatan deteksi pelanggaran, risiko audit dan sanksi meningkat.	Manajemen, Penjaminan Mutu, Unit Kerja
			Kurangnya pengawasan pelaksanaan prosedur kepatuhan	Tidak ada kontrol yang memadai terhadap penerapan SOP.	Potensi pelanggaran aturan, sulit dilakukan perbaikan.	Manajemen, Auditor, Penjaminan Mutu, Unit Kerja
			Prosedur pelatihan kepatuhan yang tidak terjadwal	Tidak ada jadwal atau mekanisme pelatihan rutin untuk pegawai terkait kepatuhan.	Kurangnya kesadaran pegawai, risiko pelanggaran aturan meningkat.	Manajemen, OSDM, Penjaminan Mutu
		Risiko Teknologi Informasi	Ketidakpatuhan terhadap standar keamanan informasi	Sistem TI tidak sesuai dengan standar keamanan seperti ISO 27001 atau regulasi pemerintah.	Sanksi administratif, pelanggaran audit, potensi kebocoran data.	Unit IT, Bagian Umum (Biro Hukum)
			Tidak memenuhi regulasi perlindungan data pribadi	Data pribadi tidak dikelola sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi dan aturan terkait.	Denda besar, gugatan hukum, hilangnya kepercayaan pengguna dan publik.	Manajemen, Unit IT, Bagian Umum (Biro Hukum), OSDM, Humas
			Penggunaan software ilegal atau tanpa lisensi resmi	Penggunaan perangkat lunak tanpa izin resmi	Sanksi hukum, denda, reputasi institusi menurun.	Unit IT, Bagian Umum (Biro Hukum), Keuangan, Humas, Unit Kerja

NO	KATEGORI RISIKO	JENIS RISIKO	RISIKO	DESKRIPSI	DAMPAK	PIHAK TERKAIT
				melanggar aturan hak cipta dan lisensi.		
			Kegagalan pelaporan kepatuhan TI	Laporan kepatuhan TI tidak lengkap atau terlambat disampaikan ke regulator atau pimpinan.	Sanksi administratif, reputasi buruk, risiko audit negatif.	Manajemen, Unit IT, Penjaminan Mutu
			Tidak adanya pelatihan kepatuhan TI bagi pegawai	Pegawai tidak mendapatkan pelatihan terkait kebijakan dan prosedur kepatuhan TI yang berlaku.	Pelanggaran aturan, risiko keamanan meningkat, kurangnya kesadaran karyawan.	Manajemen, Unit IT, OSDM